

KETIDAKADILAN GENDER YANG DIALAMI PEKERJA PEREMPUAN DI DAERAH PARIWISATA

Oleh :

Siti Masrohatin

Abstract:

Gender isn't a difference of sex or god's will, but is something that is oriented him and her by means of social and culture process in long term. The power of woman in tourism sector is very interesting to be solved. According to conventional, tourism sector is public sector, that is a man area, but a woman area is domestic sector. Based on tourism development in Bali, there are many jobs opportunity that can be entered by woman community. In fact it will be affected by gender problem.

Gender problem in this paper is studied based on research in two villages which different development tourism at Ubud, Gianyar, Bali. The result of the research shows that the woman worker in tourism sector are discriminated which is reflected by lower level wage than man worker although they have same education and or same job position.

Keyword: Tourism, Gender, Problem

PENDAHULUAN

Pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya yakni pariwisata yang berbasis Budaya Bali yang dilandasi Agama Hindu (Pitana,1999; Sirtha, 1998; Sugiri, 1998), sehingga Pariwisata Bali tidak bisa lepas dari adat dan Budaya Bali. Model pariwisata budaya seperti ini, dapat berkembang dengan baik apabila dapat mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat Bali sebagai pendukung budaya. Dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, tidak boleh dilupakan pemberdayaan kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam sektor pariwisata merupakan hal yang cukup menarik, karena sektor pariwisata berada di sektor publik yang secara konvensional merupakan wilayah kerja laki-laki sedangkan, perempuan wilayah kerjanya di sektor domestik (Anon., 2000).

Sejalan dengan perkembangan pariwisata di Bali, akan banyak muncul kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Akan semakin banyak pula kaum perempuan yang memasuki wilayah kerja kaum laki-laki dengan konsekuensi masalah jender akan menghadang mereka. Fenomena tersebut menyebabkan sangat menarik untuk mengkaji ketidakadilan jender, model apa yang dialami pekerja perempuan di sektor pariwisata khususnya di Kawasan Pariwisata Ubud, Bali.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Pariwisata di Propinsi Bali

Keunggulan pariwisata dalam hal perolehan devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat tidak perlu diragukan lagi. Hal tersebut mengakibatkan persaingan antar daerah, antar propinsi, antar negara nampaknya semakin

tinggi. Telah disadari bahwa persaingan itu akan terus meningkat, maka masing-masing pihak berusaha untuk meningkatkan potensi dalam artian yang seluas-luasnya dan berusaha mencari berbagai terobosan untuk dapat memenangkan persaingan itu (Sugiri, 1998).

Selain sektor pertanian, sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Propinsi Bali (Suyatna dkk, 1989) dengan harapan dapat mendorong munculnya sektor-sektor lain, seperti industri kerajinan maupun usaha-usaha jasa lainnya (Suardi dan Astiti, 1990). Pada awal kegiatan pariwisata di Propinsi Bali sebagian besar wisatawan berkunjung ke Kawasan Pariwisata Ubud dengan tujuan ingin menyaksikan dari dekat kehidupan masyarakat yang bersifat agraris yang dipadukan dengan jiwa seni yang tinggi. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata, meningkat pula kesempatan kerja di luar sektor pertanian (Mantra dan Kutaneegara, 1990).

Saat ini, pariwisata di Bali khususnya di kawasan Pariwisata Ubud telah berkembang dengan pesat, hal ini dapat dilihat dari indikator perkembangan pariwisata antara lain dengan melihat pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara (Wagito, 1995). Jumlah wisatawan mancanegara yang langsung datang ke Bali mengalami peningkatan yaitu dari 1.032.476 orang tahun 1994 menjadi 1.187.153 orang tahun 1998 (Diparda, 1999).

Gender dan Permasalahannya

Istilah Gender diambil dari ilmu bahasa, berarti satu dari tiga jenis gramatika yang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin kata benda (maskulin, feminin dan neuter). Dalam pengertian ilmu sosial, istilah ini diartikan sebagai pola hubungan (relasi) laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ciri-ciri sosial masing-masing, tercakup di dalamnya pembagian kerja, pola relasi kuasa perilaku, peralatan, bahasa dan persepsi yang membedakan laki-laki dari perempuan. Sebagai pranata sosial, gender bukan sesuatu yang baku dan tidak berlaku universal dalam artian berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya dan dari waktu ke waktu lainnya. Dalam pengertian ini, gender sesungguhnya lebih berkaitan dengan sistem sosial masyarakat dan jauh lebih luas dari sekadar isu perempuan saja (Hafidz, 1995).

Oakley (1972 dalam Fakih, 1996) menyatakan gender adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (seks) merupakan kodrat Tuhan, karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara jender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socialy constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan, baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Dapat ditegaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain yang biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural, oleh karena itu jender berubah dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin (seks) tidak berubah. Memperhatikan peranan perempuan dalam pembangunan, sejak sensus 1971 sudah mulai dirasakan adanya kesenjangan partisipasi dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Faktor ini mendorong timbulnya pemikiran nasional untuk melibatkan perempuan dalam

pembangunan. Munculnya Menteri Muda Urusan Peranan Wanita kemudian berubah menjadi Meneg UPW merupakan suatu bukti realisasi pemikiran tersebut. Namun, kegiatan pembangunan untuk perempuan masih bersifat *crash* program yang tujuannya untuk meningkatkan peran wanita keluarga sehat.

Program-program untuk perempuan pada pelita V mulai dijabarkan secara konkret yaitu :

1. Pembinaan tenaga kerja wanita melalui kegiatan ekonomi produktif
2. Perlindungan dan pencegahan diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita
3. Penyediaan dan pelayanan bagi peran ganda.
4. Menciptakan usaha produktif wanita di pedesaan dan perkotaan.

Kemudian pada pelita V peran wanita lebih banyak ditekankan pada peningkatan kedudukan dan status wanita dan akhirnya pada pelita VI peran wanita sudah menjadi “mitra sejajar” kaum pria. Secara teoretis peningkatan peran wanita sudah banyak mencapai hasil dan kemajuan. Akan tetapi, pengakuan itu masih bersifat umum, pengakuan yang bersifat khusus terhadap berbagai kelompok wanita masih belum terlihat (Iqbal, 1994). Pengakuan yang tidak simpatik terhadap kaum perempuan, yaitu masih adanya anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dibandingkan dengan laki-laki. Jika anggapan ini benar dan terus berlaku di masyarakat konsekuensinya perempuan akan selalu dinomorduakan setelah laki-laki. Berarti yang baik-baik selalu diperoleh lebih dahulu oleh laki-laki, baru setelah itu perempuan. Secara moral, anggapan itu tidak benar karena perempuan juga manusia seperti laki-laki. Era sekarang adalah era industrialisasi, dimana sektor industri sangat diharapkan menjadi motor pembangunan, bahkan kebijaksanaan pembangunan saat ini dapat dikatakan bias kepada sektor industri. Pendek kata, dalam sektor industri laki-laki tampaknya merupakan “anak emas” dalam pembangunan. Tenaga kerja adalah input dalam proses produksi termasuk di sektor industri. Ada anggapan bahwa tenaga kerja itu adalah homogen, jarang dibedakan antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak perhatian justru diberikan pada perbedaan tenaga kerja, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan pendidikan serta keahlian (Arya Putra, 1994).

Ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan akan memunculkan persepsi bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan rendah dengan imbalan (upah/gaji) yang rendah pula. Pekerjaan perempuan selama ini umumnya terbatas pada sektor rumah tangga (sektor domestik). Walaupun kini, para perempuan mulai menyentuh pekerjaan di sektor publik, jenis pekerjaan inipun merupakan perpanjangan dari pekerjaan rumah tangga misalnya: bidan, juru rawat, guru, sekretaris dan pekerjaan lainnya yang lebih banyak memerlukan keahlian manual. Begitu pula mengenai soal upah dan gaji. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama.

Meskipun prospek pekerja perempuan cukup baik dilihat dari pertumbuhan angkatan kerja perempuan lebih cepat dari angkatan kerja laki-laki, namun tuntutan persamaan hak atas perolehan gaji dengan laki-laki belum sepenuhnya berhasil. Hal ini, disebabkan oleh selain sumberdaya manusia pekerja perempuan masih rendah (jumlah pekerja perempuan buta huruf masih dua kali lipat dari pekerja laki-laki) juga disebabkan

oleh tingkat absentisme dan pemutusan hubungan kerja di kalangan perempuan cukup tinggi. Misalnya untuk menikah, melahirkan dan memelihara anak. Akibatnya banyak pengusaha enggan menginvestasikan sumberdaya mereka untuk memberikan latihan kepada pekerja perempuan.

Sementara pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, selama ini masih mengalami berbagai kendala yang dapat diartikan bahwa kaum perempuan belum saatnya untuk mandiri secara total. Misalnya pekerja perempuan tidak bisa bekerja dalam kondisi sedang hamil, harus mendapat ijin dari suami, orang tua dan perusahaan harus menyediakan angkutan antar-jemput. Di dalam keluarga, laki-laki memperoleh perhatian yang lebih dibandingkan perempuan. Hal ini, sangat jelas pada keluarga dengan kondisi ekonomi paspasan. Orang tua cenderung memilih anak laki-laki untuk melanjutkan studinya ketimbang anak perempuan. Hampir di seluruh daerah di Indonesia ada kondisi diskriminasi seperti ini (Sumanto, 1993).

Kaum perempuan mengalami diskriminasi tidak saja di sektor domestik, di sektor publikpun kaum perempuan mengalami hal yang sama. Tidak ada masyarakat industri yang perempuannya secara ekonomis setara dengan laki-laki, karena era industri mempunyai wajah yang bias jender dan seksis. Sistem ekonomi industri kapitalistik yang mengutamakan pertumbuhan dan mendorong konsumsi justru menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima perempuan dibanding laki-laki. Kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan perempuan maka semakin besar kesenjangan upah yang diterima terhadap laki-laki. Pada tingkat pendidikan SD kesenjangan lebih dari 100 % (upah Rp 27.000,00 untuk perempuan dan Rp 55.000,00 untuk laki-laki). Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan kesenjangan itu semakin menyempit. Untuk jam kerja per minggu kesenjangan berkisar 30 % artinya perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja yang sama dengan laki-laki per minggunya menerima upah 30 % lebih sedikit. Hal serupa terjadi juga di jenis usaha, artinya perempuan yang melakukan usaha ekonomi yang sama dengan laki-laki mendapatkan penghasilan yang lebih rendah dari pada laki-laki (Hafidz, 1995).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa wanita Indonesia sudah mencapai kemajuan yang nyata dalam pendidikan, kesempatan kerja dan keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Namun, apabila diamati lebih mendalam akan ditemui kenyataan bahwa kesempatan yang diperoleh wanita masih tertinggal dibanding kaum pria. Di bidang pendidikan, pada tahun 1990, persentase wanita yang buta huruf sudah sangat berkurang dibandingkan keadaan tahun 1985, namun, persentase wanita Indonesia yang masih buta huruf (21,31 %) dibandingkan dengan kaum laki-laki (10,39 %) masih jauh lebih tinggi keadaan tahun 1990. Hal yang sama juga dalam hal pencapaian pendidikan, angka pencapaian pendidikan wanita cenderung terkonsentrasi pada tingkat Sekolah Dasar (Biro Pusat Statistik, 1992).

Tingkat pendidikan yang sama antara pria dan wanita ternyata juga tidak menjamin gaji atau upah yang setara dalam dunia kerja. Untuk tingkat pendidikan SMTA upah yang diterima perempuan (Rp 101.194,00/bulan) lebih rendah daripada pekerja laki-laki dengan upah (Rp 137.732,00/bulan). Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin

besar perbedaan antara upah kerja wanita dengan pekerja pria. Di dunia kerja, masih ada berbagai praktek yang merugikan kesempatan wanita untuk terjun ke dunia kerja seperti diskriminasi dalam rekrutmen, pelecehan seksual dan diskriminasi dalam kenaikan pangkat. Sering terjadi bahwa perusahaan-perusahaan tertentu menggunakan kriteria jenis kelamin yang membatasi kesempatan kaum perempuan untuk menduduki posisi-posisi jabatan tertentu dalam perusahaan (Notosusanto, 1994).

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi bukan merupakan fenomena yang baru di Indonesia. Banyak perempuan, terutama perempuan dari "golongan bawah" sudah lama akrab dengan berbagai lapangan pekerjaan. TPAK perempuan merupakan salah satu indikator status perempuan. Semakin tinggi TPAK perempuan semakin tinggi pula status perempuan. Untuk kasus di Indonesia, tidak bisa ditarik garis lurus demikian karena peningkatan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja untuk mereka. Hal itu, ditunjukkan oleh dua hal, pertama masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah). Kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah.

Walaupun pekerja pria juga mengalami masalah rendahnya tingkat penghasilan dan kesejahteraan, namun kondisi pekerja wanita jauh lebih parah. Secara umum dapat dikatakan, peluang kerja pria relatif lebih baik. Di negara maju, 70 % perempuan bekerja dalam lapangan pekerjaan yang terorganisasi, ternyata hanya terkonsentrasi dalam 25 lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan mereka itupun masih dapat dimasuki oleh sejumlah pria. Sementara itu, kaum pria diketemukan tersebar dalam tidak kurang dari 300 lapangan pekerjaan. Sebagian kecil saja kaum perempuan yang dapat memasuki lapangan pekerjaan pria ini (Bennholdt dan Thomsen, 1984 dikutip dalam Susilawati, 1992).

Angka-angka tersebut mengisyaratkan bahwa di dalam masyarakat yang diwarnai oleh emansipasi yang sudah maju sekalipun, karakteristik pekerjaan pria dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor yang sama. Berbagai jenis pekerjaan dianggap cocok dengan karakteristik perempuan. Contohnya, pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan lain-lain. Sebaliknya, pekerjaan yang dianggap cocok untuk pria lebih dikaitkan dengan kualifikasi tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan peluang kerja perempuan berkaitan erat dengan "modal" yang dimiliki oleh tenaga kerja perempuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa *human capital* perempuan yang meliputi pendidikan, latihan dan pengalaman relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan *human capital* pria. Perbedaan ini terjadi karena keluarga cenderung mengalokasikan sumberdaya yang berupa waktu dan uang secara rasional.

Peluang kerja perempuan juga ditentukan oleh "segmentasi pasar". Pasar tenaga kerja sering dianggap sebagai "arena" yang terbuka bagi siapa saja. Pencari kerja apapun jenis kelaminnya, bisa bersaing di atas landasan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Akan tetapi pada kenyataan pasar tenaga kerja tersegmentasi menjadi dua. Pertama, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan sektor primer yang relatif lebih baik dalam upah, jaminan keamanan dan peluang promosi. Yang kedua, terdiri atas pekerja-pekerja sektor sekunder yang memiliki upah yang rendah jaminan keamanan kurang dan peluang promosi yang terbatas (Susilawati, 1992).

Hasil penelitian yang dilakukan Bappeda Tingkat I Bali bekerja sama dengan Universitas Udayana (1995), peranan perempuan dalam pembangunan yang dicerminkan dari profil aktivitas dan curahan tenaga kerja, menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam pembinaan hidup keluarga. Kerja rumah tangga tetap merupakan dunianya perempuan dengan curahan waktu yang lebih besar daripada pria. Perempuan berperan aktif dalam pekerjaan mencari nafkah serta kegiatan sosial. Rata-rata curahan waktu wanita secara keseluruhan lebih besar dari pada pria. Peranan perempuan khususnya dalam mencapai nafkah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, status perkawinan, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan luas tanah garapan.

METODE PENELITIAN

Uraian dalam tulisan ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dua dusun penelitian yang berbeda perkembangan pariwisatanya di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Penelitian ini, merupakan penelitian survei dengan metode sensus. Responden dalam penelitian ini adalah semua pekerja yang bekerja pada masing-masing jenis usaha nonpertanian yang ada di dua dusun penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Wiratha (1998) di dua dusun yang berbeda perkembangan pariwisatanya di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, didapatkan bahwa, pada sektor industri pekerja perempuan terkonsentrasi (30,3%) pada jenis usaha kerajinan kayu dengan kegiatan tidak memerlukan keterampilan khusus, pekerja laki-laki hanya 18,4 %. Begitu pula pada sektor jasa pekerja perempuan lebih banyak (27,3 %) bekerja pada jenis usaha warung makan, jumlah pekerja perempuan hampir empat kali lipat dibandingkan pekerja laki-laki (4,1 %). Fenomena di atas terjadi pada wilayah yang belum berkembang pariwisatanya. Pekerja perempuan mengalami marginalisasi dalam bentuk pergeseran perempuan ke jenis-jenis kegiatan yang dinilai tidak membutuhkan keterampilan khusus.

Pada wilayah yang telah berkembang pariwisatanya, nasib pekerja perempuan tidak jauh berbeda. Pekerja perempuan lebih banyak mengisi kesempatan kerja pada jenis usaha kios (14,3 %), sementara pekerja laki-laki hanya 9,2 %. Pada sektor jasa pekerja perempuan terkonsentrasi pada jenis usaha restoran (36,6 %) dan jenis usaha warung makan (6,3 %) jauh di atas pekerja laki-laki masing-masing 21,3 % dan 0,8 %. Pekerja perempuan lebih banyak terlibat pada dua jenis usaha (restoran dan warung makan), karena jenis kegiatan pada kedua jenis usaha ini relatif tidak memerlukan keterampilan yang tinggi.

Berdasarkan status pekerjaan, pekerja perempuan lebih banyak terlibat pada jenis kegiatan yang termasuk sektor informal (21,9 %) jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki (14,1 %). Ini berarti, lebih banyak pekerja perempuan berstatus sebagai pekerja keluarga yang tidak mendapat upah (Arya Putra, 1994; Depnaker RI, 1995). Pekerja perempuan dengan status bekerja keluarga (14,1 %) jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki (6,9 %). Berdasarkan jabatan pekerjaan, pekerja perempuan mengalami marginalisasi sebagai proses feminisasi atau segregasi. Hal ini bisa dilihat dari terkonsentrasinya pekerja perempuan ke dalam jabatan pekerja yang seolah-olah sudah

terfeminisasi atau pekerja yang dianggap sebagai pekerja perempuan. Seperti sekretaris (tenaga administrasi), pedagang, jenis-jenis pekerjaan yang masih merupakan kepanjangan dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (sektor domestik) yang lebih banyak memerlukan keahlian manual (Sumanto, 1993; Siagian, 1993; Fakhri, 1996).

Di daerah yang sudah berkembang pariwisatanya, pekerja perempuan (82,0 persen) dengan jabatan pekerjaan sebagai pelayan/buruh/kuli sementara laki-laki dengan jabatan yang sama hanya 74,6 %. Hal ini, disebabkan oleh jenis usaha yang muncul menyertai kegiatan pariwisata seperti warung makan, restoran, kios, toko suvenir yang pada umumnya lebih mudah dimasuki oleh pekerja perempuan. Munculnya jenis usaha bank dan jasa informasi wisata mengakibatkan pekerja perempuan lebih banyak (5,6 %) dengan jabatan sebagai tenaga administrasi dibandingkan pekerja laki-laki (2,8 %). Jabatan pekerjaan sebagai pimpinan didominasi oleh pekerja laki-laki (10,8 %), sementara pekerja perempuan hanya 3,1 persen jauh di bawah pekerja laki-laki. Hal ini, terjadi bertumpu pada akar permasalahan gender yaitu subordinasi. Ada anggapan bahwa perempuan itu adalah "emosional" maka kaum perempuan tidak tepat sebagai pemimpin atau menjadi manajer. Ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender (Fakhri, 1996).

Rata-rata upah yang diterima oleh pekerja perempuan selalu lebih rendah daripada pekerja laki-laki di semua sektor usaha. Pada sektor industri pekerja perempuan di bayar (Rp 158.000,00/bulan) hampir satu setengah kali lebih rendah dari pekerja laki-laki (Rp 207.000,00/bulan). Begitu pula pada sektor perdagangan pekerja perempuan hanya di upah (Rp 99.000,00/bulan) jauh di bawah upah pekerja laki-laki (Rp 118.000,00/bulan). Fenomena di atas bukanlah hal yang mengejutkan, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa upah pekerja perempuan selama ini relatif lebih rendah dari pekerja laki-laki. Hal ini, disebabkan investasi *human capital* yang diterima kaum perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, terutama dalam bidang pendidikan, latihan dan pengalaman kerja (Sumanto, 1993).

Dari hasil penelitian didapatkan pekerja perempuan dengan pendidikan rendah (32,8 %) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki yang hanya 18,5 % dengan pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan pekerja perempuan akan berpengaruh pada besarnya upah yang diterima. Pekerja perempuan akan mengalami apa yang disebut dengan diskriminasi di bidang ekonomi yang tercermin dari ketimpangan upah yang diterima oleh pekerja perempuan dibandingkan pekerja laki-laki (Hafidz, 1995). Begitu pula marginalisasi sebagai proses ketimpangan ekonomi yaitu marginalisasi menunjuk pada ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan (Siagian, 1993). Semakin rendah tingkat pendidikan pekerja perempuan, kesenjangan upah yang diterima semakin tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Pada tingkat pendidikan rendah pekerja perempuan dibayar (Rp 82.000,00/bulan) jauh lebih rendah dibandingkan dengan upah pekerja laki-laki (Rp 136.000,00/bulan).

Semakin tinggi pendidikan pekerja perempuan, kesenjangan upah semakin kecil. Pada tingkat pendidikan tinggi pekerja perempuan di bayar (Rp 181.000,00/bulan), perbedaan upah tidak terlalu jauh dibandingkan dengan upah yang diterima pekerja laki-laki yaitu (Rp 226.000,00/bulan).

KESIMPULAN

Kegiatan pariwisata, telah mampu menciptakan kesempatan kerja melalui berbagai jenis usaha yang terkait dengan pariwisata yang bisa dimanfaatkan baik oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Walaupun, kaum perempuan sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan di sektor pariwisata, namun berbagai permasalahan gender selalu ada, yang membatasi kaum perempuan di sektor publik. Karena, sektor pariwisata adalah sektor publik yang merupakan wilayah kerja laki-laki, sehingga muncul berbagai masalah gender di alami oleh kaum perempuan di sektor pariwisata seperti, berbagai bentuk marginalisasi diskriminasi dan subordinasi yang tercermin pada ketimpangan upah, terkonsentrasinya pekerja perempuan pada jenis-jenis pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anomimus. 2000. *Siapkah Perempuan Bali Hadapi Otonomi Daerah?* Dalam *Prima*. Minggu, 4-10 Juni, No. 85, Th. ke III, Minggu ke-1, hlm. 11, kol. 1-5.
- Arya Putra, Gatot. 1994. *"Diskriminasi Wanita di Sektor Manufaktur"*. Dalam *Kompas*. Rabu, 3 Agustus, No. 37, Th. ke-30, hlm. 12, kol. 1-9.
- Bappeda Tingkat I Bali dan Universitas Udayana. 1992. *Perkembangan Tenaga Kerja di Berbagai Sektor di Daerah Bali*.
- Bappeda Tk. I Bali dan Universitas Udayana. 1995. *Peranan Wanita dalam Pembangunan*.
- Biro Pusat Statistik 1992. *Penduduk Bali : Hasil Sensus Penduduk 1990*. Seri S2.14, Tabel 27.8, hlm. 143.
- Departemen Tenaga Kerja RI. 1995. *Perencanaan Tenaga Kerja Nasional*.
- Dinas Pariwisata Dati I Bali. 1999. *Statistik Pariwisata Bali '98*.
- Fakih, Mansour. 1996. "Gender sebagai Alat Analisis Sosial. *Jurnal Analisis Sosial*. Edisi 4/November. hlm. 7-20.
- Hafidz, Wardah. 1995. "Pola Relasi Gender dan Permasalahannya". *Peper Disampaikan pada Diskusi Gender suatu Tinjauan Multidimensi*. Yogyakarta, 29 April.
- Iqbal, Mohammad. 1994. "Wanita Kepala Rumah Tangga dan Kemiskinan". Dalam *Kompas*. Kamis, 7 Juli, No. 10, Tahun ke-30, hlm 4, kol. 5-9.
- Mantra, Ida Bagus dan Kutaneegara. 1990. "Dampak Industri Pariwisata terhadap Kehidupan Budaya di Ubud, Bali. *Populasi*. 1 (2): 73-90.
- Notosusanto, Smit. 1994. "Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam *Kompas*. 12 Agustus.
- Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali*. Penerbit Bali Post. *Prima*. Minggu, 4-10 Juni. No. 85, Th III, Minggu Ke-1, hlm. 11, kol. 1-5.
- Siagian, Faizal. 1993. "Marginalisasi Wanita dalam Industrialisasi Bercorak Kapitalis". *Analisis CSIS*. November-Desember, No. 6 Tahun. XXII.
- Sirtha, I Nyoman. 1998. "Aspek Budaya Makanan Tradisional Bali dalam Menunjang Program Pariwisata". *Dinamika Kebudayaan*. September, 01: 61-66.
- Suardi, IDP dan Ni Wayan Sri Astiti. 1990. "Pola Pendapatan Petani di Daerah Objek

- Wisata". Studi Kasus di Kecamatan Ubud. *Majalah Ilmiah Universitas Udayana*. Januari, Tahun XVII, (23): 153-160.
- Sugiri, N. 1998. "Strategi/Kebijaksanaan Pemda Bali dalam Mengembangkan Potensi Tujuan/Kawasan Wisata Pulau Bali". Peper disampaikan pada ADUMLA, Angkatan XXII Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- Sumanto, Ali. 1993. "Nasib Pekerja Wanita Tetap di bawah Laki-laki. Dalam *Bali Post*. Selasa, 21 Desember, No. 124, Tahun. ke-46, hlm. 6, kol.1-4.
- Susilawati, Dewi H. 1992. "Peluang Kerja dan Upah Tenaga Kerja Perempuan". Dalam *Bernas*. 13 Pebruari.
- Suyatna, I Gde, IGAA. Ambarawati dan Elisabeth Lallo. 1989. "Dampak Pariwisata terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Pertanian di Kabupaten Buleleng dan Badung." *Majalah Ilmiah Universitas Udayana*. Januari, Tahun XVI, (20): 109-116.
- Wagito. 1995. "Kebijaksanaan Pembangunan Pariwisata Nasional Indonesia." Dalam Fandeli, Chafid (Ed.). *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. hlm. 3-14.
- Wirartha, I Made. 1998. Kesempatan Kerja Nonpertanian di Daerah Pariwisata. Tesis (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.